

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan luas wilayah dan kondisi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk tertinggi di Asia Tenggara. Pentingnya akan ketersediaan energi merupakan hal utama dalam menaikkan kapasitas listrik suatu negara. Tenaga listrik merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan listrik seperti penerangan dan proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan industri. Jumlah ketersediaan listrik sebuah negara dapat menjadi indikator penting dalam menentukan sebuah negara berkembang atau tidak.

Pembangunan infrastruktur listrik yang tidak merata di wilayah Indonesia menjadi kendala dalam pemenuhan kapasitas energi yang dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur masih berpusat di pulau Jawa membuat kurangnya perhatian di wilayah lain. Dalam mengatasi hal tersebut, Indonesia melakukan kerjasama antar negara di wilayah Asia Tenggara melalui APG. Program ini merupakan salah satu proyek di bawah *ASEAN Center For Energy (ACE)* yang bertujuan untuk meningkatkan energi yang handal dan efisien di kawasan Asia Tenggara dengan memanfaatkan keberagaman energi yang dimiliki setiap negara anggota sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang sedang berkembang. Proyek ASEAN Power Grid ini merupakan program dibawah visi ASEAN 2020 yang

diadopsi dalam KTT Informal ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2 Desember 1997.

Proyek pertama interkoneksi APG dilakukan antara Kalimantan Barat dengan negara tetangga yaitu Sarawak, Malaysia. Kerjasama ini diwakili oleh kedua perusahaan listrik negara milik Indonesia yaitu PT, PLN (Persero) dan SESCO Malaysia. Interkoneksi ini dilakukan melalui saluran transmisi SUTET 275 KV antara GITET Mambong dan GITET Bengkayang sejauh 120 km sebanyak 201 Menara. Kerjasama ini dilakukan dalam dua fase perjanjian selama 20 tahun, Perjanjian pertama fokus pembelian listrik oleh PT. PLN (Persero) wilayah Kalimantan Barat ke SESCO Malaysia dan perjanjian fase kedua mengenai jual-beli antara perusahaan listrik tersebut berdasarkan beban puncak setiap daerah.

Dengan adanya kerjasama interkoneksi antara kedua wilayah tersebut, kondisi kelistrikan di Kalimantan Barat menjadi lebih baik ditandai dengan surplusnya daya sebesar 110,61 MW di tahun 2017, sehingga tidak ada lagi terjadinya defisit dan pemadaman bergilir atau bahkan terancam *black out*. Kegiatan ekspor-impor listrik ini juga memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat. Kini, PT. PLN lebih percaya diri dalam hal ketersediaan listrik yang dimiliki, sehingga dapat menarik para investor untuk datang dan menanamkan modalnya di wilayah Kalbar. Surplusnya energi juga membuat perusahaan industri tidak perlu membangun PLTU sendiri. Masuknya investor tersebut tentunya mendorong

perekmbangan perekonomian daerah Kalimantan Barat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan indeks pembangunan Manusia di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini juga menjadi bukti kesuksesan dalam kerjasama interkoneksi tenaga listrik yang dilakukan